

# **LKJ-IP**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025**



**KANTOR CAMAT BATUKLIANG**

## **KATA PENGANTAR**

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), mengisyaratkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai dari tingkat yang paling bawah hingga tingkat yang paling atas untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang tertuang dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Konsepsi dasar pembuatan LKj-IP adanya keinginan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta kemampuan untuk menyediakan Public Goods and services sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Demikian halnya dengan Kantor Camat Batukliang sebagai salah satu SKPD, telah mencoba untuk memberikan pelayanan prima (Service Excellence) kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Dan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya Kantor Camat Batukliang telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) untuk tahun 2025.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Camat Batukliang wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas serta tepat waktu. Laporan tersebut berupa kegiatan taktis operasional maupun teknis administratif yang diselenggarakan oleh Seksi maupun Sekretariat di bawah koordinasi Camat seperti tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan ,susunan organisasi, tugas dan fungsi Kecamatan yang baru dan perubahan Renstra Kecamatan Batukliang Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja yang dibuat oleh Kantor Camat Batukliang sesungguhnya memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dan juga sebagai wahana untuk melaksanakan evaluasi dan sebagai bahan perencanaan tugas berikutnya.

Guna memenuhi kedua fungsi utama itu, laporan akuntabilitas kinerja ini secara garis besarnya berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja selama tahun 2025. Sementara itu, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2025 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2025.

Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja kepada para stakeholders. Di sini informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan oleh dan untuk perbaikan kinerja Kantor Camat Batukliang dalam upaya pemenuhan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta upaya peningkatan kinerja bagi seluruh staf Kantor Camat Batukliang

Matang, 27 Februari 2026

  
MANTANG BATUKLIANG  
Lalu Sudirman, S.Si,MM.  
NIP. 12311990031049

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Tugas dan Fungsi .....	3
1.2. Data Kepegawaian .....	3
1.3. Struktur Organisasi .....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
2.1. Rencana Strategis.....	6
2.2. Rencana Aksi Tahunan .....	9
2.3. Indikator Kinerja Utama.....	15
2.4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 2025.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja.....	16
3.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran .....	18
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	21
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	22
BAB IV PENUTUP.....	24
LAMPIRAN .....	

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel .1 Rincian capaian kinerja tahun 2025.....</i>	<i>vi</i>
<i>Tabel 1.1 Data Pegawai Kantor Camat 31 Desember 2025.....</i>	<i>3</i>
<i>Tabel.2.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....</i>	<i>7</i>
<i>Tabel.2.2 Program dan Kegiatan.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabel.2.3 Rencana Aksi Tahun 2025.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabel.2.4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel.2.5 Perjanjian Kinerja.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel.3.1 Skala Capaian .....</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 1 .....</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran 2 .....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran 3 .....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 3.3 Aset Tahun 2025 .....</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....</i>	<i>23</i>

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Batukliang Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Batukliang Tahun 2021 - 2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Batukliang menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2025 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan visi dan misi, Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Batukliang. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

**Tabel .1 Rincian capaian kinerja tahun 2025**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	REALISASI
			2025
1	2	3	
Meningkatnya kinerja kecamatan	Nilai Kinerja Camat	215	210
	Nilai SAKIP PD	BB Predikat	BB Predikat
	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	-
	Capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan		
Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	100%	100%
Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	75%	75%

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis indikator Nilai SAKIP Kecamatan, realisasi tahun 2025 adalah BB. Capaian ini memenuhi target dikarekan dokumen – dokumen sudah dilengkapi dengan baik. Namun dalam capaian indikator sedangkan untuk indeks kepuasan masyarakat dapat terealisasi 98 %. Kemudian persentase desa maju di wilayah kecamatan dapat terealisasi 100% dan terakhir dalam indikator Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat dan stackholder terealisasi 100%

Kantor Camat Batukliang sebagai sebuah SKPD melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka memaksimalkan tugas dan tugas pokok dan fungsi, telah ditetapkan target kinerja setiap tahun , sebagai acuan sekaligus indikator keberhasilan sebuah SKPD dalam melaksanakan tugasnya dalam masa satu tahun anggaran.

Pada tahun 2025, Kantor Camat Batukliang telah berupaya maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan, namun dalam pelaksanaan kegiatan banyak dihadapkan dengan berbagai kendala, baik internal maupun eksternal seperti perubahan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan adanya program yang tidak mencapai target. Hambatan atau kendala dimaksud lebih rinci akan kami sampaikan pada uraian Laporan kinerja Kantor Camat Batukliang tahun anggaran 2025.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD**

#### **1. Kedudukan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, merupakan unsur Penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok Kecamatan Batukliang adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahi oleh Bupati Kepada Camat sebagai perangkat daerah. Sementara itu untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Kecamatan Batukliang menyelenggarakan fungsi-fungsi :

##### **1. CAMAT**

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Camat mempunyai fungsi:

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan Pemerintah Daerah yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan program kerja kecamatan;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Kecamatan;
  - c. Pembinaan manajemen keuangan dan kepegawaian lingkup Kecamatan;

- d. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kecamatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau instansi terkait;
- e. Pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja;
- f. Perumusan kebijakan teknis kewilayahan sesuai lingkup tugasnya;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Pembinaan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- j. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa/ kelurahan ataupun kerja sama desa/ kelurahan dengan pihak ketiga;
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau pegawai Kelurahan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- m. Pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- n. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan publik;
- o. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- p. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- q. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- r. Pembinaan administrasi kependudukan lingkup kecamatan;
- s. Pemberian pertimbangan terhadap penetapan perijinan dan rekomendasi teknis tertentu sesuai peraturan perundang-undang;
- t. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang ekonomi Pembangunan dan bidang kesejahteraan rakyat;
- u. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- v. Koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- w. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- x. Pengkoordinasian pelaksanaan musyawarah pembangunan di desa/ kelurahan dan tingkat Kecamatan;
- y. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- z. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

## 1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2025 adalah sebanyak 12 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

### DATA PEGAWAI OPD KANTOR CAMAT BATU KLIANG

Tabel 1.1 Data Pegawai Kantor Camat 31 Desember 2025

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	- 1 1 4 2
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. b. c.	- - -
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	2 7 1 -
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2	- 1

c. S1/DIV	7
d.DIII	2
e. SMA sederajat	1
f. Paket A	-

Uraikan analisis singkat tentang kondisi personil OPD dengan kebutuhan personil dalam menunjang kinerja OPD. Analisis dapat dilakukan pada aspek jumlah pegawai, jenis/ jenjang pendidikan, pangkat golongan dan aspek-aspek lain dibidang kepegawaian yang dianggap mempengaruhi kinerja OPD.

### 1.3. Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdiri dari:

Unsur Pimpinan adalah Camat;

Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Unsur Pelaksana adalah Kepala Seksi terdiri dari:

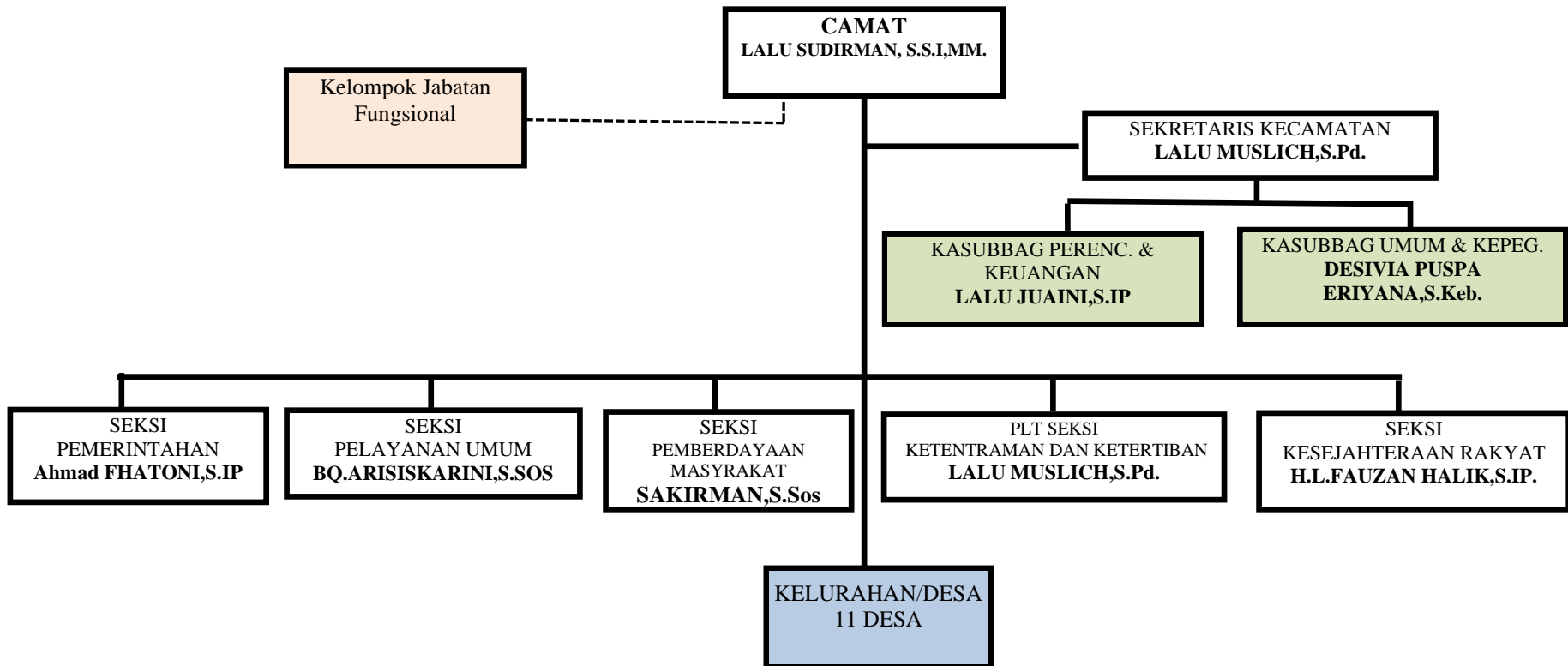
- 1) Kepala Seksi Pemerintahan;
- 2) Kepala Seksi Pelayanan Umum;
- 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 5) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan Struktur Organisasi Lengkap dengan Nama Pejabat**

Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah  
Nomor : 90 Tahun 2016  
Tanggal : 30 Desember 2016  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,  
Tugas Pokok dan Fungsi



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1.RENCANA STRATEGIS**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) Kantor Camat Batukliang ini merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih , yang mewarnai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi di atas, Kantor Camat Batukliang telah menyusun dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, yang diarahkan untuk mencapai visi dan misi dimaksud, khususnya misi ke 5 (lima), **“ Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan berkualitas “.**

Agar Rencana strategis ini dapat bermanfaat dalam rangka kemajuan Daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Batukliang, program-program yang akan dilaksanakan mengacu pada Rencana strategis ini.

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) Kantor Camat Batukliang ini merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih , yang mewarnai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

### 1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintahan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah , maka dirumuskan tujuan **“Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan”**.

### 2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Adalah sebagai berikut:

Tabel.2.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
Meningkanya kualitas layanan publik	Nilai SAKIP Kecamatan	BB Predikat	BB Predikat	100
	Indeks Kepuasan Kecamatan	89 Point	87.78	98

Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	100	100	100
Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan masyarakat dan stackholder	75	75	100

### 3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. sebagai berikut:

- Strategi :Meningkatkan kualitas manajemen kecamatan
- Kebijakan :-Koordinasi kecamatan dengan stekeholder
  - Peningkatan layanan administrasi
  - Peningkatan kualitas layanan
  - Penigkatan Laporan Keuangan dan Kinerja Kecamatan

### 4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2025, Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

Tabel.2.2 Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Keterangan
1	<p><b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b></p> <p>1.1 . Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.                      1.2 . Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      1.3 . Administrasi Umum Perangkat Daerah                      1.4 . Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      1.5 . Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      1.6 . Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	
2	<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b></p> <p>2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                      2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p>	
3	<p><b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b></p> <p>3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p>	
4	<p><b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b></p> <p>4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>	
5	<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b></p> <p>5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>	
6	<p><b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b></p> <p>6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa .</p>	

## 2.2 RENCANA AKSI TAHUN 2025

SKPD : Kantor Camat Batukliang

TAHUN : 2025

**Tabel.2.3 Rencana Aksi Tahun 2025**

Uraian	Indikator Kinerja		Rencana Aksi				Kegiatan/Sub Kegiatan/Aktifitas	Anggaran					Penanggung Jawab
	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi Per Triwulan					Rp	Rencana Aksi Per Triwulan				
			I	II	III	IV			I	II	III	IV	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2	0	0	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp11.403.624,00	Rp5.701.812,00	0	0	Rp5.701.812,00	SEKCAM & KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp16.650.624,00	Rp16.650.624,00	0	0	0	SEKCAM & KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	3	3	3	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.399.715.265,00	Rp349.928.816,25	Rp349.928.816,25	Rp349.928.816,25	Rp349.928.816,25	SEKCAM & KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	5	3	3	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp27.854.304,00	Rp6.963.576,00	Rp6.963.576,00	Rp6.963.576,00	Rp6.963.576,00	SEKCAM & KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp12.598.576,00	0	Rp12.598.576,00	0	0	SEKCAM & KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	4	4	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp85.074.855,00	Rp42.537.427,50	Rp42.537.427,50	0	0	SEKCAM & KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	6	6	6	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp29.696.716,00	Rp7.424.179,00	Rp7.424.179,00	Rp7.424.179,00	Rp7.424.179,00	SEKCAM & KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	1	1	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp18.820.000,00	Rp9.410.000,00	Rp9.410.000,00	0	0	SEKCAM & KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	18	0	18	0	0	Pengadaan Mebel	Rp23.223.379,00	0	Rp23.223.379,00	0	0	SEKCAM & KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	3	3	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp26.275.500,00	Rp6.568.875,00	Rp6.568.875,00	Rp6.568.875,00	Rp6.568.875,00	SEKCAM & KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp35.674.944,00	Rp8.918.736,00	Rp8.918.736,00	Rp8.918.736,00	Rp8.918.736,00	SEKCAM & KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	0	5	5	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp71.865.104,00	0	Rp35.932.552,00	Rp35.932.552,00	0	SEKCAM & KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	0	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp30.186.050,00	Rp30.186.050,00	0	0	0	SEKCAM & KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	6	0	3	0	3	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp7.826.624,00	0	Rp3.913.312,00	Rp3.913.312,00	0	CAMAT
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	0	0	0	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp14.174.740,00	0	0	0	Rp14.174.740,00	CAMAT DAN KASI PELUM
Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	1	1	0	0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp39.208.700,00	Rp39.208.700,00	0	0	0	CAMAT DAN KASI PMD

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	0	0	0	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp42.112.522,00	0	0	0	Rp42.112.522,00	CAMAT DAN KASI TRANTIBUM
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporan	1	0	0	0	1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp326.299.888,00	0	0	0	Rp326.299.888,00	CAMAT DAN KASI KESRA
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	2	2	2	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp42.058.592,00	Rp10.514.648,00	Rp10.514.648,00	Rp10.514.648,00	Rp10.514.648,00	CAMAT DAN KASI PMD
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen	2	0	0	1	1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp20.593.422,00	0	0	Rp10.296.711,00	Rp10.296.711,00	CAMAT DAN KASI PEMERINTAHAN

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN SKPD  
KANTOR CAMAT BATUKLIANG

Tabel.2.4 Indikator Kinerja Utama (Iku)

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RENSTR A 2016	TERGET CAPAIAN TIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENSTRA
			2021	2022	2023	2025	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SAKIP Kecamatan	C	C	C	B	B	B	B
2	Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan	75	75	75	85	85	89	89
3	Nilai Kinerja Camat	165	165	165	200	200	220	220
4	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	100	100	100

### 2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan tahun Lima Renstra Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2025 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2021-2026.

Tabel.2.5 Perjanjian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder	Persentase penurunan gangguan trantibum
Meningkatnya kinerja kecamatan	Meningkanya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah	Persentase usulan masyarakat yang disetujui
		Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar **Rp2.281.313.429** (*dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*).

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru, Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$3. \text{ Persentase Pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indicator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel.3.1 Skala Capaian

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d<85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d<70	KURANG
5.	Nilai <55	SANGATKURANG

### 3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Kantor Camat Batukliang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Camat Batukliang Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD.

Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### 1. SASARAN NOMOR 1 : Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder.

Sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu :

*Persentase pengendalian trantibum yang melibatkan stake holder.*

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1. Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2026	Sumber Data
						2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	75	75	100	75	75	75	Laporan Seksi Tantribun dan Kesra

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

### 1. **Indikator Persentase penurunan gangguan trantibum**

Capaian indikator nya adalah 75% atau mencapai persentase target 100% dengan perbandingan capaian dari tahun:

- a. Tahun n-2 (tahun 2023); yaitu 75%
- b. Tahun n-1 (tahun 2024); yaitu 75%
- c. Tahun 2025; yaitu 75%
- d. Target akhir renstra (2026); yaitu 75%

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator tersebut adalah:

#### 1. **Faktor Internal**

- Kualitas dan Kuantitas sumber daya manusia ( SDM ) yang menangani gangguan trantibum
- Kemampuan dan keterampilan SDM dalam menangani gangguan trantibum
- Ketersediaan peralatan dan teknologi yang memadai untuk mendukung penanganan gangguan trantibum
- Efektivitas system manajemen dan koordinasi antar instansi terkait kegiatan rutin dalam melaksanakan patroli terpadu kecamatan yang melibatkan POLRI,TNI,SATPOLPP, Tim Kecamatan, tokoh masyarakat lainnya.

#### 2. **Faktor Eksternal**

- Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat mempengaruhi tingkat gangguan trantibum
- Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai
- Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

#### 3. **Faktor kebijakan dan regulasi**

- Kebijakan dan regulasi yang mendukung penangan gangguan trantibum
- Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan gangguan trantibum
- Efektivitas implementasi kebijakan dan regulasi terkait gangguan trantibum, dengan memahami faktor – faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator menurunnya angka gangguan trantibum, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menangani gangguan trantibum dan meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

## 2. SASARAN NOMOR 2 : Meningkatnya kualitas layanan publik

Sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu : *Indeks Kepuasan Masyarakat*.

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2. Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra	Sumber Data
			2025	2025		2024	2023	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Point	89	87.78	95	84.78	83	89	Kasi Pelum

Capaian indikator nya adalah 87.78 atau mencapai persentase target 97% dengan perbandingan capaian dari tahun:

- Tahun n-2 (tahun 2023); yaitu 83
- Tahun n-1 (tahun 2024); yaitu 84.78
- Tahun 2025; yaitu 87.78%
- Target akhir renstra (2026); yaitu 89

Adapun faktor yang mempengaruhi TIDAK tercapainya target indikator tersebut adalah:

### a. Faktor Proses, Prosedur Infrastruktur dan Teknologi

- Selain beberapa dokumen arsip yang tidak dapat terpenuhi dari sisi kelengkapan dan keabsahannya juga kurangnya pelatihan dan pengembangan kemampuan petugas, komitmen dan motivasi petugas yang masih rendah serta waktu tunggu yang tidak efisien
- Keterbatasan dan ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan tidak yang kurang memadai atau kurang efektif
- Sistem informasi ketersediaan penunjang dan tidak terintegrasi

### b. Faktor Komunikasi dan Informasi

- Kurangnya Informasi yang jelas dan akurat tentang pelayanan
- Komunikasi yang tidak efektif antara petugas dan masyarakat karena kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan sehingga manajemen pelayanan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun cara mengembalikan kepercayaan masyarakat dan untuk mencapai target kinerja yang di rencanakan adalah dengan cara memahami Faktor -faktor yang

mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja pelayanan umum, kita akan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat mencapai target kinerja yang diinginkan.

**3. SASARAN NOMOR 3 : Meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa**

Sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu :

*Persentase desa maju di wilayah kecamatan*

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.3. Capaian Kinerja Sasaran 3**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra 2026	Sumber Data
						2024	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase desa maju di wilayah kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	Laporan Kasi PMD dan Pemerintahan

Capaian indikatornya adalah 100% atau mencapai persentase target 100% dengan perbandingan capaian dari tahun:

- a. Tahun n-2 (tahun 2023); yaitu 100%
- b. Tahun n-1 (tahun 2024); yaitu 100%
- c. Tahun 2025; yaitu 100%
- d. Target akhir renstra (2026); yaitu 100%

Adapun faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator tersebut adalah:

- Terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan seperti Evaluasi APBDES Induk dan Perubahan, Evaluasi LPPDES, Fasilitasi Musdes Rkpdes dan Rpjmdes, Pembinaan Perangkat Desa, Evaluasi dan Pengendalian APBDES, Evaluasi Perkembangan Desa, dan Kegiatan Lomba Desa LPPDES guna memfasilitasi dan mengawasi pemerintahan Desa
- Pengawasan dan Evaluasi yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pemerintahan desa serta dengan memahami faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas

pemerintahan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa agar menjadi desa yang mandiri.

### 3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

#### a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Berisi penjelasan tentang kondisi SDM dan aset yang mempengaruhi capaian kinerja OPD. Efisiensi SDM dilihat dari perbandingan antara jumlah kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang untuk mencapai sasaran. Efisiensi aset dilihat dari pemanfaatan aset dalam kondisi baik secara optimal.

Semakin banyak aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan merupakan bentuk inefisiensi sumberdaya. Karena nilai ekonomis aset akan semakin menurun, sementara aset tersebut tidak memberikan manfaat untuk mencapai sasaran kinerja.

Analisis efisiensi SDM dan Aset adalah sebagai berikut :

Pencapaian sasaran strategis Kantor Camat Batukliang tidak bisa terlepas dari aspek sumber daya yang dimiliki.

Pada tahun 2025, Kantor Camat Batukliang mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh Kasi dan Kasubbag. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia , pencapaian kinerja Kantor Camat Batukliang dipengaruhi oleh kondisi aset tetap yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Kantor Camat Batukliang tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Aset Tahun 2025**

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>6.069.590.356,37</b>	<b>6.141.470.834,00</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>6.069.390.356,37</b>	<b>6.141.398.834,00</b>
1.3.01	Tanah	5.221.200.000,00	5.221.200.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.179.244.015,00	1.090.149.015,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.331.330.600,00	1.331.330.600,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.687.500,00	9.687.500,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	6.609.596,00	6.609.596,00
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>6.069.590.356,37</b>	<b>6.141.470.834,00</b>

## **b. Analisis Efisiensi Anggaran**

Untuk mengisi analisis efisiensi anggaran, OPD dapat memilih semua atau salah satu dari item dibawah ini sesuai kondisi OPD masing-masing:

- apakah ada kegiatan yang dihapus dengan tidak mengurangi capaian kinerja? **Tidak ada**
- apakah ada pengurangan jumlah pagu anggaran kegiatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan tidak mengurangi output/ capaian kinerja ? jika ada uraikan nama kegiatan , jumlah pagu serta upaya yang telah dilakukan **Tidak ada**
- apakah ada penghematan anggaran kegiatan dalam mencapai target kinerja ? jika ada uraikan faktor-faktor pendukung penghematan anggaran **Tidak ada**
- apakah ada optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan memilih alternatif , metode/teknik/inovasi yang paling efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja. **Ada, yaitu penyelenggaraan STQ Kecamatan yang digabungkan dengan penyelenggaraan Lasqi Kecamatan.**
- apakah ada kolaborasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi lain yang menimbulkan peningkatan efisiensi dan efektifitas capaian kinerja. **Ada dengan Dukcapil contoh : percepatan kepemilikan ktp, kk dinas dukcapil Akte Kelahiran berkolaborasi dengan kegiatan expo yang ada.**

## **3.4. Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Batukliang dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$\frac{5}{(4/3)*100}$	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.281.313.429,00</b>	<b>2.238.288.251,00</b>	<b>98,11</b>	<b>2.174.366.085,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.190.900.283,00</b>	<b>2.149.193.251,00</b>	<b>98,09</b>	<b>2.107.116.085,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.399.715.265,00	1.379.267.095,00	98,53	1.372.857.380,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	867.326.892,00	847.047.884,00	97,66	875.733.454,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	532.388.373,00	532.219.211,00	99,96	493.889.926,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	3.234.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	791.185.018,00	769.926.156,00	97,31	734.258.705,00
5.1.02.01	Belanja Barang	541.388.670,00	533.218.890,00	98,49	529.498.200,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	183.196.348,00	170.418.678,00	93,02	136.660.765,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.780.000,00	11.643.002,00	98,83	3.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.820.000,00	18.645.586,00	99,07	33.399.740,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	31.200.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>2.190.900.283,00</b>	<b>2.149.193.251,00</b>	<b>98,09</b>	<b>2.107.116.085,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>90.413.146,00</b>	<b>89.095.000,00</b>	<b>98,54</b>	<b>67.250.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.413.146,00	89.095.000,00	98,54	67.250.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	33.064.939,00	32.735.000,00	99,00	28.910.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.777.367,00	9.600.000,00	98,18	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	47.570.840,00	46.760.000,00	98,29	33.840.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>90.413.146,00</b>	<b>89.095.000,00</b>	<b>98,54</b>	<b>67.250.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.281.313.429,00</b>	<b>2.238.288.251,00</b>	<b>98,11</b>	<b>2.174.366.085,00</b>

Penyerapan anggaran belanja Kantor Camat Batukliang tahun 2025 belanja langsung sebesar 98,11 % Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik.

## **BAB IV PENUTUP**

Sebagai implementasi Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 36 tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, serta tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan ,susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah.

Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan yang dilaksanakan, yang berhasil mengarahkan program pembangunan untuk mencapai tujuan yang diamanatkan.

Dalam tahun 2025, Kantor Camat Batukliang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai perangkat daerah. Sangat disadari masih diperlukan perbaikan pada berbagai bidang untuk dapat meningkatkan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Batukliang dalam bentuk :

1. Perbaikan perencanaan dan estimasi serta penggunaan anggaran sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang ditunda atau ditangguhkan.
2. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, dan evaluasi karena koordinasi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan secara tepat waktu.
3. Penambahan sarana dan prasarana berupa peralatan kerja seperti komputer, mesin pencetak (Printer), mesin penggandaan serta pengadaan dan pemeliharaan kendaraan operasional akan sangat mempengaruhi kualitas kerja yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah yang bertugas di Kantor Camat Batukliang.
4. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, dengan melibatkan multi pihak dan lintas program sehingga akan menghasilkan kualitas kerja sebagaimana yang diharapkan.

5. Diperlukan adanya peningkatan dalam sistem pengumpulan data sehingga setiap hasil/outcome dari kegiatan atau program yang dilaksanakan dapat terlihat dan tergambar dalam setiap laporan hasil kegiatan/program yang akhirnya tercantum dalam laporan pertanggungjawaban kinerja Kantor Camat Batukliang.



Camat Batukliang,

*[Handwritten Signature]*  
Lain Sidiqman, S.Si,MM

Np. 196912311990031049